

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan adalah salah satu bagian penting dalam menunjang produktifitas seseorang manusia. Pemerintah dunia sudah mencanangkan berbagai program guna membuat seluruh lapisan masyarakat dapat meningkatkan pelayanan kesehatannya, salah satunya dengan adanya *Universal Health Coverage* yang memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Di Indonesia sendiri pemerintah menerapkan sistem Jaminan sosial nasioal yang didalamnya mencakup Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). BPJS Kesehatan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan badan usaha lainnya ataupun masyarakat biasa (BPJS Kesehatan, 2021).

Berdasarkan Perpres No. 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah (Perpres RI, 2018). Di dalam kepesertaan JKN terdiri dari Penerima Bantuan Iuran dan bukan Penerima Bantuan Iuran. Salah satu peserta bukan Penerima Bantuan Iuran adalah pekerja mandiri (bukan penerima upah) yang mendapatkan penghasilan dari usaha sendiri sehingga ketika mereka menjadi peserta JKN harus membayarkan iuran setiap bulannya (Pratiwi, 2016).

Pada akhir tahun 2019, tepatnya pada Desember 2019 dunia dilanda Pandemi virus corona (*Corona Virus Disease*) atau yang lebih dikenal dengan nama Covid-19. Covid-19 yang berdampak sangat besar terhadap kehidupan dunia terlebih di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan

Republik Indonesia, per tanggal 31 Juli 2020 total Pekerja baik pekerja formal maupun pekerja informal yang terdampak covid-19 mencapai 3,5 Juta Jiwa, dengan rincian pekerja yang telah di *Cleaning* datanya oleh BPJS sekitar 2,1 juta Jiwa (Kemenaker, 2020).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatatkan penurunan jumlah peserta pada 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, jumlah peserta mandiri meningkat di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19. BPJS Kesehatan mencatat bahwa pada akhir 2020, jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 222,46 juta jiwa. Angka itu berkurang sekitar 1,64 juta orang dibandingkan dengan jumlah peserta pada 2019 sebanyak 224,1 juta jiwa. Sedangkan per 31 Agustus 2021 peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 225,96 juta naik 3,5 juta jiwa dari tahun 2020 (BPJS Kesehatan, 2021).

Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan mengenai pengurangan jumlah peserta di antaranya terjadi pada peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Non PBI. Pada tahun 2020 peserta Mandiri yang terdiri dari Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) mengalami penurunan sebanyak 30,4 juta orang dan naik per 31 Agustus 2021 menjadi 31,1 juta orang. Penurunan itu membuat jumlah peserta BPJS Kesehatan pada tahun 2020 mencakup 82,51% penduduk Indonesia, yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlahnya saat ini mencapai 269,6 juta jiwa. Dalam kondisi saat ini, jaminan kesehatan menjadi kebutuhan dan fungsi kepatuhan yang dilakukan Bersama lintas sectoral mempengaruhi jumlah kepesertaan. Meskipun begitu, saat pandemic Covid-19 tetap mempengaruhi semua aspek (BPJS Kesehatan, 2021).

Berdasarkan data dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dalam Sistem Monitoring dan Evaluasi Jaminan Sosial (SISMONEV) monitoring terpadu cakupan kepesertaan di Indonesia pada tahun 2021 yaitu jumlah peserta aktif dan tidak aktif (menunggak iuran) pada peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) per Juni 2021 terdapat data yang diperoleh yaitu PBPU yang aktif sebanyak 14,32 juta jiwa (46,2%) sedangkan yang tidak aktif sebanyak 16,64 juta jiwa (53,8%) (DJSN, 2021).

Peserta mandiri atau peserta pekerja informal memiliki potensi atau kemungkinan yang lebih besar dibandingkan dengan peserta kategori selain peserta mandiri untuk tidak patuh dalam melakukan pembayaran iuran JKN. Hal tersebut terjadi karena pada pekerja formal dalam melakukan pembayaran iuran JKN dikelola oleh tempat mereka bekerja yang dengan cara dipotong secara langsung dari upah atau gaji mereka. Sedangkan pada sektor informal harus mengelola pembayaran iuran jaminan kesehatannya sendiri (Nopiyani, dkk, 2015). Menurut Thabrany (2015) peserta pekerja informal atau pekerja mandiri merupakan tantangan utama untuk mencapai target cakupan dan keberlangsungan suatu sistem jaminan sosial. Tantangan tersebut terutama dalam keikutsertaan dan pembayaran iuran JKN secara konsisten karena faktor esensial dalam suksesnya suatu sistem jaminan sosial adalah iuran. Iuran JKN merupakan salah satu sumber pembiayaan jaminan kesehatan. Tingkat ketidakpatuhan pembayaran iuran JKN yang tinggi akan menurunkan angka kolektabilitas iuran yang dapat menimbulkan resiko dalam hal finansial yang besar bagi penyelenggara jaminan kesehatan (Novianti, 2016).

Komponen terpenting untuk memudahkan pemanfaatan pelayanan kesehatan, yaitu kepatuhan dalam membayar iuran JKN bagi peserta mandiri. Bagi peserta JKN kategori pekerja bukan penerima upah wajib membayar iuran ke BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya. Bagi peserta kategori pekerja bukan penerima upah yang membayar iuran lewat tanggal 10 maka status kepesertaannya akan diberhentikan sementara dan akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran iuran sebesar 2,5% dari biaya pelayanan dari setiap bulan tertunggak (Rosmanely, 2018). Kepesertaan mandiri yang terus meningkat tidak sejalan dengan kepatuhannya dalam membayar iuran JKN. Kepatuhan merupakan ketaatan atau ketidaktaatan pada perintah atau aturan. Sedangkan kepatuhan dalam membayar iuran berarti perilaku seseorang yang memiliki kemauan membayar iuran secara tepat berdasarkan waktu yang telah ditetapkan (Fildzah, 2016).

Kepatuhan membayar dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, sebagaimana teori Lawrence (1980) dalam Notoatmodjo (2014) ada beberapa

faktor yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku seseorang untuk menjadi taat atau tidak taat terhadap pembayaran iuran JKN, yang diantaranya dipengaruhi oleh faktor predisposisi (*predisposing factor*), faktor pendukung (*enabling factor*) dan faktor pendorong (*reinforcing factor*). Faktor predisposisi terdiri dari pendidikan, pekerjaan, pendapatan, pengetahuan, motivasi, pengeluaran rata-rata perbulan, kemauan membayar dan kemampuan membayar. Faktor pendukung terdiri dari jarak menuju tempat pembayaran, waktu tempuh menuju tempat pembayaran dan tempat pembayaran. Sedangkan faktor pendorong yaitu mengenai persepsi.

Kepesertaan yang semakin meningkat tidak sejalan dengan kepatuhannya dalam membayar iuran JKN. Kepatuhan itu sendiri merupakan suatu tindak ketaatan pada peraturan atau perintah. Sedangkan perilaku seseorang yang memiliki kemauan membayar premi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan merupakan arti dari kepatuhan dalam membayar premi (Malik, 2021). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar iuran jaminan kesehatan. Salah satunya yaitu penelitian Pratiwi (2016) menyatakan bahwa faktor yang berhubungan dengan keteraturan membayar iuran JKN yaitu pengetahuan, pendidikan, pekerjaan, ketersediaan tempat pelayanan, jarak ke tempat pelayanan, kemampuan dan kemauan membayar iuran, persepsi terhadap tempat pelayanan kesehatan dan motivasi. Dalam penelitian ini variabel kemampuan dan kemauan dalam membayar iuran JKN tidak diteliti karena ketika telah menjadi peserta JKN maka seseorang telah mampu dan mau untuk membayar iuran namun masih banyak peserta mandiri JKN yang tidak patuh dalam membayar iuran.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai kepatuhan membayar iuran diantaranya yaitu menurut penelitian Malik (2021) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar menyimpulkan bahwa ada hubungan antara Pendidikan, pendapatan, motivasi dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan Mandiri di wilayah kerja puskesmas bajeng kabupaten gowa. Pendidikan diperlukan untuk mendapatkan informasi yang akan digunakan dalam meningkatkan kualitas hidup. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin mudah untuk menerima informasi sehingga makin banyak

pengetahuan yang dimilikinya. Sebaliknya pendidikan yang kurang akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap nilai-nilai yang diperkenalkan. Selain itu semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin banyak pula keinginan yang diinginkannya dan acuh terhadap kebutuhan yang dianggapnya tidak penting. Pendapatan masyarakat yang tinggi akan meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat untuk patuh dalam membayar iuran. Dan motivasi juga memiliki hubungan yang signifikan terhadap keteraturan membayar iuran pada peserta mandiri. Karena jika responden kurang mendapatkan motivasi atau dorongan sehingga tidak ada penguat terhadap timbulnya sikap dan niat untuk membayar iuran BPJS mandiri.

Selanjutnya ada penelitian Nur Aziza, dkk (2021) yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara variabel pendapatan bahwa tingkat pendapatan seseorang memegang peranan penting tingginya kesadaran seseorang terhadap berasuransi kesehatan. Seseorang yang semakin tinggi tingkat pendapatan maka akan semakin sadar untuk mengikuti asuransi dan teratur dalam membayar iuran, variabel pengetahuan bahwa dengan adanya pengetahuan, individu dapat mempertimbangkan apakah dengan melakukan kepatuhan membayar iuran dapat menghindarkan mereka dari sanksi atau denda yang telah ditetapkan oleh pihak BPJS, dan variabel persepsi terhadap tarif bahwa tarif iuran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar iuran. Harga atau tarif iuran yang dikeluarkan seseorang untuk mendapatkan jasa harus seimbang dengan manfaat yang dirasakan oleh konsumen.

Hasil penelitian Ayu Wulandari, dkk (2020) menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan ( $p=0,019$ ) Salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan peserta mandiri adalah informasi. Informasi yang semakin sering diberikan kepada peserta mandiri akan semakin baik dan akan mempengaruhi tingkat pengetahuan peserta mandiri, pendapatan ( $p=0,038$ ) Pendapatan seseorang memegang peranan penting tingginya kesadaran seseorang terhadap keteraturan dalam membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pendapatan yang rendah mampu menurunkan keteraturan masyarakat dalam membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) karena masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi oleh keluarga sehingga tidak ada alokasi pendapatan yang digunakan peserta untuk membayar iuran tersebut. Pendapatan tinggi dan mempunyai tingkat kesejahteraan menengah keatas memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional, persepsi terhadap pelayanan kesehatan ( $p=0,047$ ) Persepsi peserta program JKN terhadap pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dapat mempengaruhi keinginan masyarakat untuk membayar iuran program JKN. Pengalaman baik yang dirasakan oleh peserta dapat mempengaruhi peserta untuk tetap membayarkan iuran secara rutin, sebaliknya pengalaman buruk yang dirasakan oleh peserta akan mempengaruhi peserta untuk tidak melakukan pembayaran iuran. Maka variabel pengetahuan, pendapatan dan persepsi terhadap pelayanan ada hubungan dengan kepatuhan pembayaran iuran peserta mandiri program JKN BPJS Kesehatan di Kota Solok.

Faktor lain seperti yang dilakukan oleh Annisa (2015) menyatakan bahwa pendapatan, jumlah anggota keluarga, merupakan faktor yang berhubungan dengan kemauan membayar seseorang. Peserta non PBI mandiri memiliki potensi yang lebih besar untuk tidak patuh membayar iuran karena berbeda dengan pekerjaan sektor formal yang pada umumnya dikelola oleh organisasi dimana mereka bekerja dan dipotong langsung dari gaji. Keteraturan dalam membayar iuran JKN bagi peserta mandiri merupakan komponen terpenting untuk mempermudah pemanfaatan pelayanan kesehatan.

Ketersediaan tempat pembayaran iuran merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat. Salah satu kebutuhan masyarakat adalah mendapatkan pelayanan kesehatan dengan adanya jaminan kesehatan berarti bagi masyarakat peserta mandiri JKN harus membayar iuran pada tempat pembayaran yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan agar dapat memperoleh pelayanan di fasilitas kesehatan dan dijamin oleh BPJS Kesehatan (BPJS Kesehatan, 2014).

Puskesmas Tanah Sareal Kota Bogor merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Bogor yang

bertanggungjawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas meliputi satu kelurahan yaitu Kelurahan Tanah Sareal Bogor dengan luas wilayah 105 Ha dengan batas wilayah Sebelah Utara yaitu Kelurahan Kedung Badak, Sebelah Selatan yaitu Kelurahan Sempur, Sebelah Barat yaitu Kelurahan Kebon Pedes dan Sebelah Timur yaitu Kelurahan Bantar Jati. Puskesmas Tanah Sareal memiliki pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Karena ini sedang masa pandemi ada perubahan jadwal pelayanan pada pelayanan rawat inap menjadi ditiadakan yang sebelum masa pandemi jadwal dibagi menjadi tiga shift yaitu shift pagi, siang dan malam. Sedangkan untuk rawat jalan jadwal pelayanan dari hari senin sampai dengan hari sabtu dengan jam pelayanan pukul 07.30 WIB – 11.00 WIB. Jumlah karyawan di Puskesmas Tanah Sareal adalah sebanyak 45 orang dengan jumlah tenaga kesehatan 35 orang dan tenaga kesehatan yang bertugas di unit rawat jalan adalah sebanyak 35 orang.

Berdasarkan studi pendahuluan pengukuran kepatuhan membayar iuran kepada 10 (sepuluh) orang peserta BPJS Mandiri di Unit Rawat Jalan Puskesmas Tanah Sareal, didapatkan hasil 60% atau 6 dari 10 orang pasien BPJS Mandiri yang terlibat dalam studi pendahuluan tidak patuh dalam melakukan pembayaran iuran setiap bulannya pada tanggal yang sudah ditetapkan. Dari ke 6 pasien yang tidak patuh membayar diketahui 4 pasien tidak membayar untuk melanjutkan pengobatan di puskesmas dan 2 pasien membayar secara umum untuk melanjutkan pengobatannya. Setelah dilakukan studi pendahuluan kepada 10 pasien tersebut diketahui jenjang pendidikan tinggi 7 pasien dan jenjang pendidikan rendah 3 pasien. Untuk pengetahuan baik didapatkan 6 pasien dan pengetahuan tidak baik 4 pasien. Pada pekerjaan didapatkan 7 pasien bekerja dan 3 pasien tidak bekerja. Tempat pembayaran yang sering digunakan melalui indomart atau alfamart dan 10 pasien mengatakan tempat pembayaran mudah untuk dijangkau. Persepsi terhadap pelayanan didapatkan persepsi positif 8 pasien dan persepsi negatif 2 pasien. Berdasarkan informasi dari petugas pendaftaran di Puskesmas Tanah Sareal mengenai pasien BPJS Mandiri yang tidak aktif mengakibatkan penurunan

kunjungan pada pasien Mandiri di Unit Rawat Jalan Puskesmas Tanah Sareal Kota Bogor.

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari petugas pendaftaran didapatkan bahwa terjadi penurunan kunjungan dari pasien BPJS Mandiri dari tahun ke tahun. Selama periode tahun 2018 jumlah kunjungan pasien BPJS Mandiri sekitar 2155 pasien. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 1950 pasien, terdapat selisih sebesar 205 pasien dari tahun sebelumnya. Di tahun 2020 terdapat penurunan lagi 1300 pasien, dibandingkan tahun 2019 terjadi penurunan 650 pasien. Di tahun 2021 dari bulan Januari – September mengalami penurunan lagi sebanyak 869 pasien dengan rata-rata perbulan 90 pasien, dibandingkan tahun 2020 penurunan sebesar 431 dari tahun sebelumnya.

Banyaknya status kepesertaan pasien yang tidak aktif dan juga penurunan kunjungan pasien BPJS Mandiri di Unit Rawat Jalan Puskesmas Tanah Sareal. Dikarenakan dari awal masa pandemi ini jadi pasien jarang yang berkunjung ke puskesmas, banyak pasien yang menunggak iuran BPJS yang otomatis kartu BPJS nya di Non-Aktifkan. Untuk yang pekerja banyak yang di PHK atau dirumahkan. Pembayaran iuran BPJS yang ditunggak akan berdampak pada kunjungan pasien dan hambatan pada pelayanan kesehatan dan kesulitan saat terjadi kondisi darurat, akan dilakukan pemberhentian sementara status peserta BPJS selama 1 bulan. Terjadinya penurunan angka kunjungan yang signifikan karena adanya kondisi di masa pandemi ini dan menunjukkan adanya pengurangan pemanfaatan puskesmas oleh pasien BPJS Mandiri.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan Mandiri Pada Pasien Di Unit Rawat Jalan Puskesmas Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2021”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan studi pendahuluan pengukuran kepatuhan membayar iuran kepada 10 (sepuluh) orang peserta BPJS Mandiri di Unit Rawat Jalan Puskesmas Tanah Sareal, didapatkan hasil 60% atau 6 dari 10 orang pasien



BPJS Mandiri tidak patuh dalam melakukan pembayaran iuran setiap bulannya pada tanggal yang sudah ditetapkan. Dari 6 pasien yang tidak patuh membayar diketahui 4 pasien tidak membayar untuk melanjutkan pengobatan di puskesmas dan 2 pasien lainnya membayar secara umum untuk melanjutkan pengobatannya. Dari 10 pasien didapatkan hasil tingkat pendidikan tinggi 7 pasien dan tingkat pendidikan rendah 3 pasien. Pengetahuan baik 6 pasien dan pengetahuan tidak baik 4 pasien. Lalu 7 pasien bekerja dan 3 pasien tidak bekerja. Tempat pembayaran yang sering digunakan yaitu indomart atau alfamart dan tempat pembayaran mudah untuk dijangkau 10 pasien. Dan persepsi positif terhadap pelayanan 8 pasien dan persepsi negatif terhadap pelayanan 2 pasien. Sehingga terjadinya penurunan angka kunjungan dari sektor BPJS Mandiri. Penurunan itu berlangsung sesudah dari tahun 2018 sampai dengan saat ini. Di tahun 2018 (2155 pasien) – 2019 (1950 pasien) penurunan sebesar 205 pasien. Namun dibandingkan tahun 2019 (1950 pasien) – 2020 (1300 pasien) terjadi penurunan lagi sebesar 650 pasien. Selanjutnya dibandingkan tahun 2020 (1300 pasien) – 2021 (869 pasien) penurunan sebesar 431 pasien. Karena adanya kondisi di masa pandemi ini dan menunjukkan adanya pengurangan pemanfaatan puskesmas oleh pasien BPJS Mandiri.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

- 1.3.1 Bagaimana gambaran kepatuhan membayar iuran BPJS kesehatan mandiri pada pasien di unit rawat jalan Puskesmas Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2021 ?
- 1.3.2 Bagaimana gambaran pendidikan pada pasien di unit rawat jalan Puskesmas Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2021 ?
- 1.3.3 Bagaimana gambaran pendapatan pada pasien di unit rawat jalan Puskesmas Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2021 ?
- 1.3.4 Bagaimana gambaran pengetahuan pada pasien di unit rawat jalan Puskesmas Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2021 ?
- 1.3.5 Bagaimana gambaran tempat pembayaran pada pasien di unit rawat jalan Puskesmas Tanah Sareal Kota Bogor tahun 2021 ?
- 1.3.6 Bagaimana gambaran persepsi pada pasien di Puskesmas Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2021 ?

- 1.3.7 Bagaimana hubungan pendidikan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan mandiri pada pasien di unit rawat jalan Puskesmas Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2021 ?
- 1.3.8 Bagaimana hubungan pendapatan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan mandiri pada pasien di unit rawat jalan Puskesmas Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2021 ?
- 1.3.9 Bagaimana hubungan pengetahuan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan mandiri pada pasien di unit rawat jalan Puskesmas Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2021 ?
- 1.3.10 Bagaimana hubungan tempat pembayaran dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan mandiri pada pasien di unit rawat jalan Puskesmas Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2021 ?
- 1.3.11 Bagaimana hubungan persepsi dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan mandiri pada pasien di Puskesmas Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2021 ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

##### **1.4.1 Tujuan Umum**

Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan mandiri pada pasien di unit rawat jalan Puskesmas Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2021.

##### **1.4.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui gambaran pendidikan pada pasien di unit rawat jalan Puskesmas Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui gambaran pendapatan pada pasien di unit rawat jalan Puskesmas Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2021.
3. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan pada pasien di unit rawat jalan Puskesmas Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2021.
4. Untuk mengetahui gambaran tempat pembayaran pada pasien di unit rawat jalan Puskesmas Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2021.
5. Untuk mengetahui gambaran persepsi pada pasien di Puskesmas Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2021.

6. Untuk mengetahui hubungan pendidikan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan mandiri pada pasien di unit rawat jalan Puskesmas Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2021.
7. Untuk mengetahui hubungan pendapatan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan mandiri pada pasien di unit rawat jalan Puskesmas Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2021.
8. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan mandiri pada pasien di unit rawat jalan Puskesmas Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2021.
9. Untuk mengetahui hubungan tempat pembayaran dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan mandiri pada pasien di unit rawat jalan Puskesmas Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2021.
10. Untuk mengetahui hubungan persepsi dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan mandiri pada pasien di unit rawat jalan Puskesmas Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2021.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Bagi Peneliti**

1. Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan Mandiri pada pasien di Unit Rawat Jalan Puskesmas Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2021.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi pengalaman serta menambah wawasan peneliti dalam mempraktekkan teori yang didapat. Selain itu penelitian ini merupakan salah satu syarat kelulusan di bagian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Esa Unggul Jakarta.

### **1.5.2 Bagi Universitas Esa Unggul**

1. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan atau referensi dan informasi khususnya untuk jurusan Kesehatan Masyarakat.
2. Sebagai bahan tolak ukur dari sistem pengajaran dan pemberian teori dalam melakukan penelitian secara teoritis dengan tepat dan benar.

### 1.5.3 Bagi Puskesmas Tanah Sareal

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi upaya peningkatan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai kewajiban membayar iuran BPJS Mandiri Pada pasien di Unit Rawat Jalan Puskesmas Tanah Sareal Kota Bogor.
2. Sebagai salah satu masukan berbagai pihak yang terkait untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar iuran jaminan kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan.

### 1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan Mandiri pada pasien di Unit Rawat Jalan Puskesmas Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2021. Penelitian ini dilakukan kepada pasien BPJS Mandiri di Unit Rawat Jalan Puskesmas Tanah Sareal Kota Bogor pada bulan Desember 2021- Januari 2022. Penelitian ini dilakukan karena data kunjungan pasien BPJS Mandiri mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Berdasarkan studi pendahuluan dari 10 orang pasien BPJS Mandiri, didapatkan sebanyak 6 orang pasien (60%) tidak patuh dalam membayar iuran BPJS Mandiri. Dari ke 6 pasien yang tidak patuh membayar diketahui 4 pasien tidak membayar untuk melanjutkan pengobatan di puskesmas dan 2 pasien membayar secara umum untuk melanjutkan pengobatannya. Desain penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian *cross sectional study* dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan kuesioner sebagai alat untuk pengumpulan data. Populasi dalam penelitian ini yaitu pasien BPJS Mandiri di Unit Rawat Jalan Puskesmas Tanah Sareal Kota Bogor terdapat populasi 90 orang. Dengan sampel 80 orang karena 10 orang sudah masuk kedalam studi pendahuluan. Teknik pengambilan sampel menggunakan *total sampling*. Variabel yang akan diteliti yaitu pendidikan, pendapatan, pengetahuan, tempat pembayaran, persepsi. Data yang ada akan dilakukan analisis univariat dan bivariat. Analisis bivariat akan menggunakan Uji *Chi-Square*.